

# IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN THE SECTOR TRANSPORTATION (Studi on Area Traffic Control System Program Resources in Sidoarjo District)

*by* Muhammad Erlangga Surya Mustika

---

**Submission date:** 20-Apr-2022 10:09PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1815480177

**File name:** ILMI\_USROTIN.docx (186.3K)

**Word count:** 3513

**Character count:** 23105

**IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN THE  
SECTOR TRANSPORTATION  
(Studi on Area Traffic Control System Program  
Resources in Sidoarjo District)**

**IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI SEKTOR  
TRANSPORTASI  
(Studi Pada Sumberdaya Program Area Traffic  
Control System Kabupaten Sidoarjo)**

*Muhammad Erlangga Surya Mustika<sup>1</sup>, Ilmi Usrotin Choiriyah, A. Riyadh U.B.*

*Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*

**ABSTRACT**

Technological advances that are increasingly developing make the government have to issue policies, because of the large number of road users who cause congestion at every intersection in Sidoarjo, the Area Traffic Control System (ATCS) program is implemented to optimize the implementation of traffic management control. system, in order to create control over traffic violators. traffic and minimize congestion at crossroads. This research is a qualitative descriptive study using purposive sampling technique in determining informants. For the informants, the Head of Traffic Management and Engineering, Members of the ATCS Program Operations and Community Users of Motorcycles, Cars and Public Transportation. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The data analysis technique used an interactive analysis model consisting of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. This study aims to identify and analyze the resources for the following indicators; The human resources of the existing apparatus carry out their duties and functions well in operating the ATCS Program, budget sources are adjusted to regional income, equipment resources provide the maximum possible service if there is damage to be repaired immediately, authority resources are related to sector transportation traffic on the road, such as development, monitoring, controlling and evaluating the communication system so that it relates to the operation of the Area Traffic Control System program.

**Keywords - Public Policy, Policy Implementation, Area Traffic Control System Program.**

**PENDAHULUAN**

<sup>3</sup>  
Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) hal tersebut pada pasal 1 ayat 29, menjelaskan bahwa manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah bentuk usaha dalam melaksanakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Undang-Undang di atas mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas, diperkuat dengan adanya PP Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015, kemudian dengan pelaksanaannya didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

**Indonesia.** Bergantungnya masyarakat dengan alat transportasi karena kemajuan teknologi yang semakin berkembang yang membuat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan, seperti memperluas jalan atau mengurangi pengendara dengan sistem ganjil genap seperti yang diterapkan di Ibukota Jakarta, atau perlu dilaksanakan di setiap daerah persimpangan jalan untuk meminimalisir pengguna kendaraan bermotor. Pemerintah sudah memberikan edukasi bagaimana cara berkendara dengan baik dan benar meskipun masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan keselamatannya, karena berdampak pada pengguna jalan yang sangat beresiko terjadinya kemacetan dan kecelakaan di jalan raya masyarakat harus diberikan hukuman berupa tilang agar jera, dengan adanya program ATCS setidaknya dapat meminimalisir kemacetan yang terjadi sehingga arus lalu lintas menjadi lancar dan memantau pengendara yang tidak taat lalu lintas. Dengan adanya program *Area Traffic Control System* (ATCS) di Kabupaten Sidoarjo saat ini masih belum menunjukkan dampak yang terlihat sehingga apabila dapat dinilai masih setengah jalan atau masih belum seoptimal kota-kota lain yang telah melaksanakan program ini. Maka dari itu perlu adanya para petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo untuk lebih produktif dalam penyampaian dan memberikan informasi yang transparan terkait program *Area Traffic Control System*. Berikut dapat dilihat tabel di bawah tentang jumlah unit CCTV yang terhubung dengan *Area Traffic Control System* di Kabupaten Sidoarjo.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Unit CCTV yang terhubung dengan *Area Traffic Control System* di Kabupaten Sidoarjo**

Kecamatan	Jumlah unit	Lokasi
Tarik	-	-
Prambon	1	Depan Kecamatan Prambon.
Krembung	-	-
Porong	1	Lapindo.
Jabon	-	-
Tanggulangun	1	Simpang 3 Tanggulangun.
Candi	6	Dishub Sisi Selatan, Dishub Sisi Utara, PT ECCO, Simpang 3 Candi c1, Simpang 3 Candi c2, Depan Umsida.
Sidoarjo	31	Simpang 3 Pucang, Simpang 3 Larangan, Simpang 4 Celep, Simpang 4 Pemda, Simpang Erlangga, Gajahmada c1, Gajahmada c2, Pendopo Alun Alun, Exit Tol Raya Jati, Depan Masjid Agung, Rel Kereta Api Pasar Larangan, RSUD 1, RSUD 2, Simpang Taman Gajah Mada, jl. A yani, jl. Thamrin, Simpang Trunojoyo, Depan Lippo Mall, jl. Teuku umar, Pasar Larangan, Simpang 3 Cemengkalang, Simpang 3 Sidokare, Simpang Ramayana 1, Simpang Ramayana 2, Jalan Pahlawan, Bundaran Tpi, jl. Sisimangaraja, jl. Raya gajah mada, Depan Polresta Sidoarjo, Lingkar Timur, Ssc Sidoarjo.
Tulangan	-	-
Wonoayu	3	Simpang 4 Pilang c1, Simpang 4 Pilang c2, Simpang 4 Wonoayu.
Krian	5	Simpang 4 Krian c1, Simpang 4 Krian c2, Simpang 3 Kemasen, Terminal Krian, Bypass Krian Balongbendo.
Balongbendo	1	Pos Polisi Bakalan.
Taman	1	Mako Brimob.
Sukodono	2	Simpang 4 Dungus, Simpang 4 Kebonagung.
Buduran	16	Simpang 3 Transmart, Simpang 4 Pagerwojo, Simpang 4 Maspion c1, Simpang

Kecamatan	Jumlah unit	Lokasi
		4 Maspion c2, Simpang 4 Prasung c1, Simpang 4 Prasung c2, Layang Jenggolo Selatan, Layang Jenggolo Utara, Simpang 3 Buduran 01, Simpang 3 Buduran 02, Pom Bensin Jenggolo, Pasar Buduran, Kahuripan Nirwana, Simpang Jenggolo, Simpang 4 Maspion c3, Simpang 3 Avian.
Gedangan	11	Simpang 4 Gedangan c3, Simpang 4 Seruni c1, Simpang 4 Seruni c2, Simpang 4 Gedangan c1, Simpang 4 Gedangan c2, Depan Marinir, jl. Raya tebal c1, jl. Raya tebal c2, Bundaran Aloha, Simpang 4 Seruni c3, Simpang Hangtuah.
Sedati	3	Simpang 4 pabean, bypass juanda simpang 3, jl. Raya sedati.
Waru	3	Jembatan Layang Waru, Simpang Pabrik Paku, Simpang Dea Bungurasih.
<b>Jumlah</b>		<b>85 Unit</b>

Berdasarkan data di atas tentang jumlah unit CCTV yang terhubung dengan *Area Traffic Control System* di Kabupaten Sidoarjo berjumlah 85 unit. Hal tersebut bisa dikatakan terjadi perkembangan pada setiap tahunnya, karena pada tahun 2015 waktu pertama kali diterapkan program ATCS hanya ada 3 Unit dan masih terkendala pada keterbatasan dana sehingga mempengaruhi pelaksanaan program dan berdampak pada lambatnya proses dalam melancarkan koneksi jaringan serta adanya kerusakan pada sistem yang memerlukan waktu untuk dilakukan perbaikan serta infrastruktur yang kurang optimal sangat berdampak pada kinerja pengoperasian Program ATCS tersebut, meskipun saat ini berjumlah sekian tetapi yang dapat diakses hanya 33 unit secara bergantian sehingga perlu meningkatkan sumberdaya yang lebih memadai untuk mengembangkan program ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul "Implementasi E-Government dalam Mengembangkan Sumberdaya pada Sektor Transportasi di Kabupaten Sidoarjo. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Implementasi E-Government dalam Mengembangkan Sumberdaya pada Sektor Transportasi di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi E-Government Dalam Mengembangkan Sumberdaya Pada Sektor Transportasi di Kabupaten Sidoarjo.

### Implementasi

Implementasi adalah tahap yang pasti dalam siklus pendekatan karena tanpa eksekusi yang layak, pilihan pembuat strategi tidak akan dilakukan secara efektif. Menurut Wahab dalam Sahya (2012:530) adalah suatu rangkaian pelaksanaan pilihan strategi, yang biasanya berupa undang-undang, undang-undang tidak resmi, pilihan hukum, perintah pemimpin, atau pengumuman resmi. Dalam Suharno (2013:169) pelaksanaan pengaturan publik dengan pemahaman dibawa oleh negara melalui organisasi pemerintah. Karena pada hakekatnya adalah tugas otoritas publik untuk melakukan salah satu kewajibannya, khususnya bantuan pelayanan.

### Kualitas Sumberdaya

Menurut Edward III dalam Agustino (2017:136-142) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan, berikut penjelasannya:

1. Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Agustino (2017:136-142) menyatakan bahwa tidak peduli seberapa jelas dan konsistennya urutan implementasi lebih penting lagi apa yang ditransmisikan, jika petugas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, implementasi tidak akan efektif.

2. Sumberdaya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi pada para pelaku.
3. Sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.
4. Sumberdaya kewenangan dapat dijelaskan kewenangan ini menjadi penting ketika dihadapkan dengan permasalahan, sehingga mengharuskan agar segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Sebagai pelaksana kebijakan harus diberikan wewenang yang cukup dalam membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangan.

### E-Government

*E-Government* adalah struktur atau model kerangka kerja administrasi dalam pandangan kekuatan inovasi komputerisasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan otoritatif, administrasi ke daerah, kontrol dan kontrol aset asosiasi, keuangan, biaya, tol, perwakilan, dll dalam satu kerangka. Menurut Indrajit (2002:36) *E-Government* adalah perubahan dalam hubungan antara otoritas publik dan area lokal dan individu lain yang diinvestasikan, termasuk pemanfaatan inovasi data (khususnya web) yang ditentukan untuk lebih mengembangkan kualitas administrasi. *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif.

### METODE PENELITIAN

2 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan manusia yang di teliti, menjelaskan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, moleong (2012:6). Fokus Penelitian ini yaitu Implementasi E-Government dalam Mengembangkan Sumberdaya pada Sektor Transportasi di Kabupaten Sidoarjo menurut Edwards dalam Agustino (2017:136-142) dalam indikator Sumberdaya mencakup Sumberdaya Manusia, Sumberdaya Anggaran, Sumberdaya Peralatan, dan Sumberdaya Kewenangan. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Sidoarjo terkait dengan pelaksanaan Program *Area Traffic Control System* (ATCS) di Dinas Perhubungan. Teknik penentuan informan yang digunakan pada penelitian ini dengan teknik Purposive Sampling, untuk informannya Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Anggota Pengoperasian Program ATCS dan Masyarakat Pengguna Kendaraan Motor, Mobil dan Angkutan Umum. Jenis data diambil dari berbagai sumber yaitu dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang di pergunakan yaitu model Interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Program Area Traffic Control System Kabupaten Sidoarjo

1 *Area Traffic Control System* atau dikenal dengan istilah ATCS adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas persimpangan. ATCS terdiri dari beberapa sistem utama yaitu:

1. *Server* dan *workstation* yang berfungsi sebagai pusat operasional untuk memonitor dan mengontrol kondisi lalu lintas dan seluruh persimpangan satu area.
2. *Wall Map* berfungsi menyediakan informasi status dan kondisi layar monitor.
3. *Local Controller* yang berfungsi untuk mengontrol persimpangan
4. *Video Surveillance* yang berfungsi memantau melalui jaringan kamera CCTV



5. *Vehicle Detector* yang berfungsi untuk mendeteksi kendaraan-kendaraan yang terpantau melalui CCTV.



**Gambar 1.1 Pengoperasian Program Atcs di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo**

Fungsi, Tujuan dan Pengoperasian *Area Traffic Control System (ATCS)* adalah sebagai berikut :

1. Mengatur waktu sinyal di persimpangan secara responsif dan terkoordinasi dalam keadaan tertentu.
2. Memberikan waktu hijau pada kendaraan yang memiliki prioritas (Pemadam Kendaraan, Ambulance, VVIP, Konvoi, Dll). Sesuai dengan UU 22 tahun 2009 pasal 134.
3. Menyampaikan informasi kondisi lalu lintas dan alternatif lintasan jika terjadi kemacetan (penumpukan kendaraan pada ruas jalan).
4. Menyediakan rekaman data lalu lintas, kejadian kecelakaan, dan kejadian lainnya di persimpangan.

Tujuan *Area Traffic Control System (ATCS)* adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya optimasi kinerja jaringan jalan.
2. Mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat dan berwawasan lingkungan.
3. Mengurangi jumlah dan beban petugas pengatur lalu lintas di persimpangan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan umum.
5. Untuk mencapai kinerja lalu lintas yang optimal dengan meminimalkan tundaan di setiap simpang yang dikoordinasikan dan mempersingkat waktu tempuh, dan salah satu strategi dalam upaya pengurangan emisi dari sektor transportasi.

Pengoperasian *Area Traffic Control System (ATCS)* sebagai berikut :

1. Pengatur arus persimpangan berupa lampu lalu lintas.
2. Penginput data lalu lintas berupa kamera CCTV pemantau.
3. Pengirim data berupa jaringan kabel data atau pemancar gelombang.
4. *Software* sistem ATCS.
5. Ruang kontrol (*Central Control Room*) ATCS plus Operatonya.
6. *Website* untuk informasi kepada masyarakat.

### **Dimensi Sumberdaya**

Dimensi Sumberdaya merupakan bagian dari implementasi kebijakan yang dilaksanakan pemerintah sebagai salah satu alat untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam mengeluarkan kebijakan. Dalam pelaksanaan program di Kabupaten Sidoarjo pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai pelaksana memberikan pelayanan berbentuk elektronik berupa himbuan kepada pengguna jalan untuk mematuhi satandar dalam berkendara, agar meminimalisir kemacetan, kecelakaan dan melanggar lalu lintas. Berikut indikator pada dimensi sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

### 1. Sumberdaya Manusia

Merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, jika petugas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, implementasi tidak akan efektif, dengan adanya Sumberdaya Manusia yang kinerjanya baik dapat dikembangkan kembali sehingga implementasi program tersebut akan berjalan dengan optimal. Sumber daya manusia tentu berpengaruh dan kalau di bidang manajemen dan lalu lintas ini bisa dikatakan sudah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya, maka dari itu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengoperasikan Program *Area Traffic Control System* ini. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan sumber dayanya dapat dikatakan melaksanakan tugasnya dengan cukup baik, karena sering kali selaku petugas masih belum maksimal memberikan pelayanan berupa himbauan kepada masyarakat terkait dengan keselamatan berkendara. Sebagai bahan dalam mendukung hasil wawancara ini yakni tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

Daftar Nama Petugas Atcs Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Nama Lengkap	Pendidikan	Jabatan	Kode
Febrian yudiantoro	SMA	Tenaga petugas operator atcs	A
Steven owen purnawan	SMK	Tenaga petugas operator atcs	B
Muhammad nuzul a.a.	SMA	Tenaga petugas operator atcs	C
Ella resmi melinda	D4	Tenaga petugas operator atcs	D
Narendra wafa rahmania	D4	Tenaga petugas operator atcs	E

Tabel 1.2 di atas menjelaskan nama petugas dan pendidikan terakhirnya yang bertugas mengoperasikan program *Area Traffic Control System*, terkait jadwal shift petugas dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:

**Tabel 1.3**

Jadwal Shift Petugas Atcs Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Hari/Jam	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
08.00-16.00 WIB	A	D&E	C&D	B&D	A&D	E	A
16.00-00.00 WIB	B	A	E	C	B	A	D&E
00.00-08.00 WIB	C	B	A	E	C	B	C

Tabel 1.3 di atas menjelaskan terkait pergantian shift petugas yang mengoperasikan program *Area Traffic Control System* dilaksanakan setiap hari selama 24 jam dengan melakukan pergantian shift kerja meskipun jumlah operator berjumlah 5 orang tetapi sudah menjalankan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara pada dimensi sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan program ini. Memang sumber daya manusia itu berpengaruh terhadap implementasi kebijakan mengenai program *Area Traffic Control System* ini, dalam hal sumber daya manusia haruslah yang berkualitas. Karena untuk menjalankan sebuah kebijakan para pegawai harus sangat memahami dan mengerti mengenai apa yang mereka kerjakan.

### 2. Sumberdaya Anggaran

Anggaran sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi pada para pelaku. Dalam pelaksanaan program *Area Traffic Control System* sangat diperlukannya sumberdaya Anggaran agar dapat direalisasikan sesuai dengan kebijakan yang telah diberikan dan mulai berkembang seiring kemajuan teknologi. Untuk sumber daya anggarannya itu disesuaikan saja dengan pendapatan daerah, karena walaupun pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo terlalu menuntut itu justru akan tidak baik bagi pelaksanaan setiap kebijakan yang ditetapkan, apabila anggaran tersebut ada sisa anggaran akan ditabung untuk pelaksanaan program ATCS yang lebih baik lagi. Sebagai bahan dalam mendukung hasil wawancara yang telah di disampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.4**  
**Anggaran Pemeliharaan CCTV dan Area Traffic Control System**  
**Tahun 2021**

Uraian	Sebelum Perubahan			
	Vol	Satuan	Harga	PPN
Pemeliharaan CCTV	1	Paket	100.000.000	0
Pemeliharaan CCTV (ATCS)	1	Paket	100.000.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>Paket</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>

Tabel 1.4 di atas menjelaskan terkait anggaran dalam pemeliharaan CCTV dan Area Traffic Control System di tahun 2021 digunakan untuk pelaksanaan program, karena anggaran rencana keuangan untuk masa depan, rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya.

Berdasarkan hasil wawancara pada dimensi sumberdaya Anggaran dalam pelaksanaan program ini. Dalam pelaksanaan program Area Traffic Control System sangat diperlukannya sumberdaya Anggaran agar dapat direalisasikan sesuai dengan kebijakan yang telah diberikan, agar tujuannya dapat dicapai sehingga mempermudah masyarakat dalam merasakan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

### 3. Sumberdaya Peralatan

Meningkatnya Fasilitas dan perekonomian Kota akan menimbulkan pertambahan penduduk dengan menimbulkan daya tarik bagi masyarakat untuk datang ke kawasan perkotaan dengan tujuan mencari lapangan pekerjaan, banyak patokan yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan, dengan Pengembangan sektor transportasi perlu dilakukan dalam rangka untuk menciptakan fungsi dan hirarki jaringan jalan dan hal tersebut dapat berdampak baik dalam penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi dan layanan jasa perhubungan lainnya. Sarana merupakan fasilitas yang digunakan untuk menunjang kinerja para petugas serta mempermudah pelayanan untuk masyarakat agar dipermudah dalam segala hal kepengurusan dan hal tersebut sangat penting dari berbagai aspek, terkait dengan semua pelaksanaan program-program yang berada di Dinas Perhubungan ini kami akan terus berusaha memaksimalkan program yang kami kelola karena untuk saat ini bisa dikatakan cukup optimal tetapi belum yang terbaik maka dari itu kedepannya diharapkan bisa semaju kota-kota yang besar, karena Sidoarjo saat ini sudah mulai padat dengan kendaraan, semisal ada kerusakan yang berkaitan dengan lalu lintas dapat menghubungi dinas perhubungan Kabupaten Sidoarjo, pihak dinas akan segera memperbaiki kerusakan yang membuat lambatnya pelayanan untuk masyarakat, seperti kerusakan pada jaringan rambu lalu lintas, CCTV, sistem ATCS dan sebagainya yang termasuk program Dinas Perhubungan kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil wawancara pada dimensi sumberdaya Peralatan dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang digunakan untuk menunjang kinerja para petugas serta mempermudah pelayanan untuk masyarakat agar dipermudah dalam segala hal kepengurusan dan hal tersebut sangat penting dari berbagai aspek, seperti program-program yang berada di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo untuk sarana dan prasarana bisa dikatakan cukup optimal dan terkait kerusakan jaringan atau sistem yang bermasalah akan langsung diperbaiki dengan maksimal dan semua dapat diterapkan terkait program ATCS yang akan dilaksanakan pada setiap persimpangan kabupaten Sidoarjo.

### 4. Sumberdaya Kewenangan

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Untuk pelaksanaan program ATCS di Kabupaten Sidoarjo, dinas perhubungan mempunyai kewenangan karena sebagai pengatur di sekitar lalu lintas jalan seperti mengatur waktu sinyal di persimpangan secara responsif dan terkoordinasi, apabila ada keadaan tertentu memberikan waktu hijau pada kendaraan yang memiliki prioritas (Pemadam Kebakaran, Ambulance, VVIP, Dll) dan memberikan informasi kondisi lalu lintas dan alternatif lintasan serta menyediakan rekaman data lalu lintas, kejadian kecelakaan, dan kejadian lainnya di area persimpangan, sedangkan untuk



menindaklanjuti pengguna jalan yang melanggar diperlukan adanya operasi gabungan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pelanggaran di jalan, dikarenakan pihak dari dinas perhubungan hanya bertugas memberikan himbauan terkait dengan kelengkapan berkendara tidak melanjutkan ke arah penilangan hal tersebut sudah menjadi tugas kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara pada dimensi sumberdaya Kewenangan dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan terkait dengan sektor transportasi lalu lintas di jalan, seperti pembangunan, pengembangan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi sistem perhubungan dan lagi program *Area Traffic Control System* ini berfungsi untuk melakukan pemantauan di jalan sekitar persimpangan yang rawan kemacetan hal tersebut kewenangan yang pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo laksanakan dengan cara memantau melalui CCTV, sedangkan untuk menindaklanjuti pelanggar di jalan pihak Dinas Perhubungan juga bisa melakukan tetapi dengan pihak kepolisian.

## KESIMPULAN

Sumber daya pada sub indikator. Pertama, sumber daya manusia yaitu petugas yang ada melaksanakan kinerjanya dengan optimal sesuai peraturan yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, terkait pergantian shift petugas yang mengoperasikan program *Area Traffic Control System* dilaksanakan setiap hari selama 24 jam dengan melakukan pergantian shift kerja meskipun jumlah operator berjumlah 5 orang, tapi sudah menjalankan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang diberikan. Kedua, sumber daya anggaran itu disesuaikan dengan pendapatan setiap daerah, apabila terlalu menuntut lebih dapat menimbulkan terhambatnya pelaksanaan kebijakannya. Ketiga, sumberdaya peralatan pihak Dinas Perhubungan tetap memberikan pelayanan semaksimal mungkin apabila ada kerusakan dari CCTV, atau sistem yang terjadi gangguan, akan langsung diperbaiki dengan maksimal agar masyarakat lebih meningkatkan kesadaran dalam mentaati peraturan. Keempat, sumber daya kewenangan terkait dengan sektor transportasi lalu lintas di jalan, seperti pembangunan, pengembangan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi sistem perhubungan.

## PENDANAAN

Publikasi artikel ini menggunakan dana pribadi dari penulis.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penyusun artikel ini tidak lepas dari bantuan semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya menulis skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dwi Cahyo Mardisunu, ATD selaku Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Bapak Steven Owen P selaku Anggota Pengoperasian *Area Traffic Control System*, serta para Masyarakat pengguna jalan yang berkenan meluangkan waktunya untuk menjadi responden pada penelitian ini.

## REFERENSI

- Aini, Zaharatul, Fransiska Hutapea, dan Nurul Ramadhanic. 2020. "Implementasi Sistem Pengawasan Cctv Lalu Lintas Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Dinas Perhubungan)." 11: 13.
- Devia, Devia, dan Prihanika Prihanika. 2020. "Implementasi Fasilitas Intelligent Transportation System (ITS) Di Kota Palangka Raya." *Media Ilmiah Teknik Sipil* 8(2): 72-78.
- Nur, Busyra, Niken Dyah Nawang Wulan, dan Muhammad Fadil. 2020. "Efektivitas Program Rttic Dan Atcs Untuk Mengatasi Kemacetan Di Kota Malang (Studi Kasus : Dishub Kota Malang)." : 17.
- Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) YAPIS Biak, dan Rijal Rijal. 2019. "Koordinasi Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas dalam Penanggulangan Kemacetan Kota Makassar." *Matra Pembaruan* 3(1): 47-56.
- Florence, Sophie. 2018. "INOVASI PELAYANAN PUBLIK (Studi tentang Surabaya Intelligent Transport System dalam Meningkatkan)." 6: 8.
- Leo Agustino. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Revisi. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik ; kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Ombak.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Riant Nugroho. 2009. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Government*. Yogyakarta: ANDI.



# IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN THE SECTOR TRANSPORTATION (Studi on Area Traffic Control System Program Resources in Sidoarjo District)

## ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://atcs-dishub.bandung.go.id">atcs-dishub.bandung.go.id</a> Internet Source	6%
2	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://ijccd.umsida.ac.id">ijccd.umsida.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On